

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN BULANAN

BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur. 13950
email : ptun.jakarta@gmail.com | Telepon : (021) 22859672

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Jenis Laporan	1
BAB II. PELAKSANAAN TUGAS	2
A. Kesekretariatan	2
B. Kepaniteraan	13
BAB III. TELAAHAN	21
BAB IV. KESIMPULAN, USUL DAN SARAN	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, salah satunya adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Bulanan ini merupakan kumpulan dari masing – masing Sub Bagian sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan juga di maksud pula sebagai bahan informasi penyempurnaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

C. JENIS LAPORAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki Jenis Laporan meliputi bidang Kesekretariatan, bidang Kepaniteraan dan bidang lainnya sebagai berikut :

1. Kesekretariatan :

- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

2. Kepaniteraan :

- Kepaniteraan Perkara
- Kepaniteraan Hukum

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS

A. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan PTUN Jakarta adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM dan Saprasi di lingkungan PTUN Jakarta.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :



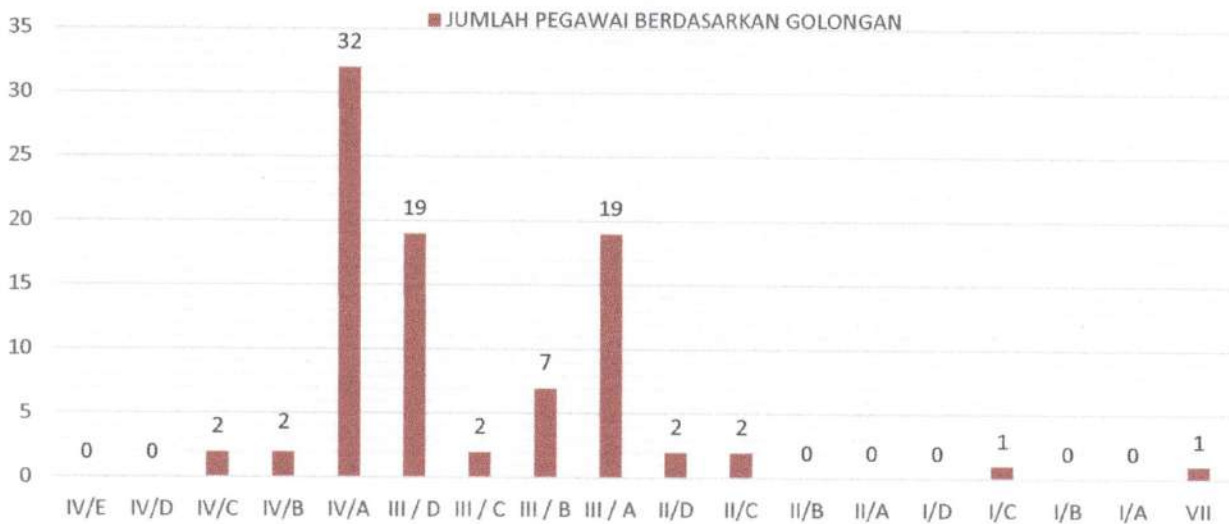
- SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

a. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2024 adalah 86 Orang (Sembilan Puluh) PNS, 2 Orang CPNS, 1 Orang PPPK (P3K) dan PPNPN berjumlah 11 Orang, yang terdiri dari Laki-laki yang berjumlah 62 orang dan Perempuan 39 Orang. Adapun rinciannya sebagai berikut :

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



Mutasi

Mutasi Kedalam Wilayah :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	-	-	-	-

Mutasi Keluar Wilayah

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Oktova Primasari, S.H.	Hakim PTUN Jakarta	Wakil Ketua PTUN Jambi	TMT 26 Agustus 2024

MUTASI Keluar Wilayah :

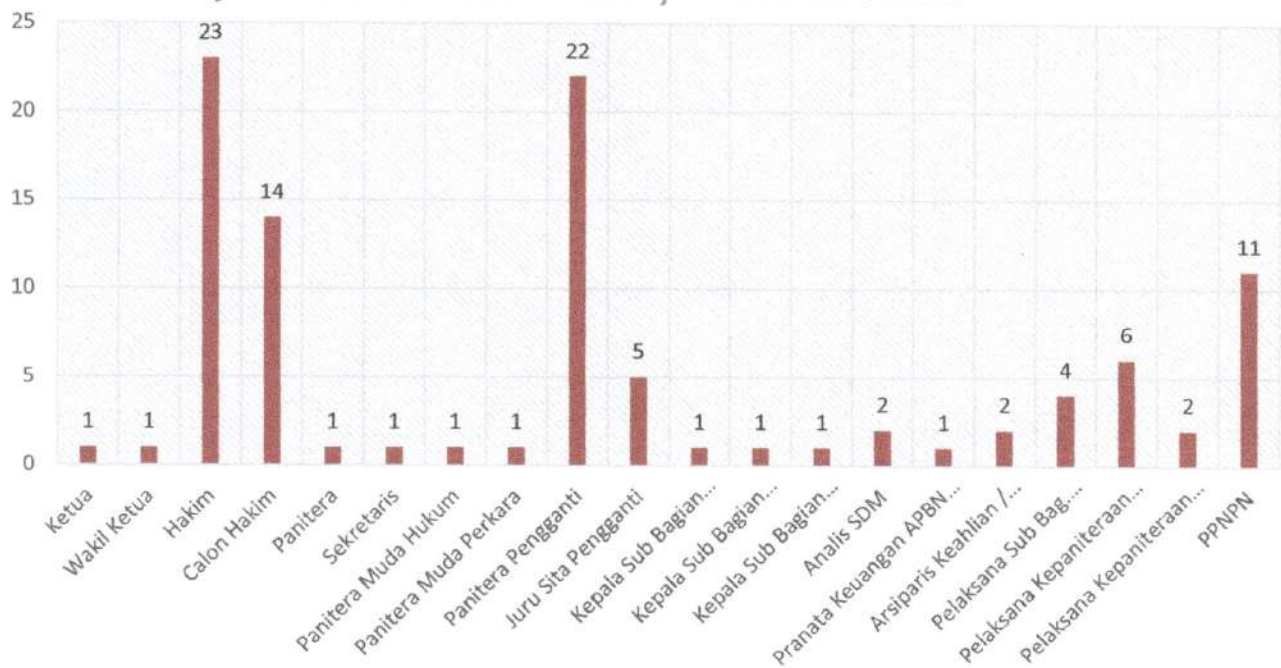
NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	-	-	-	-

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

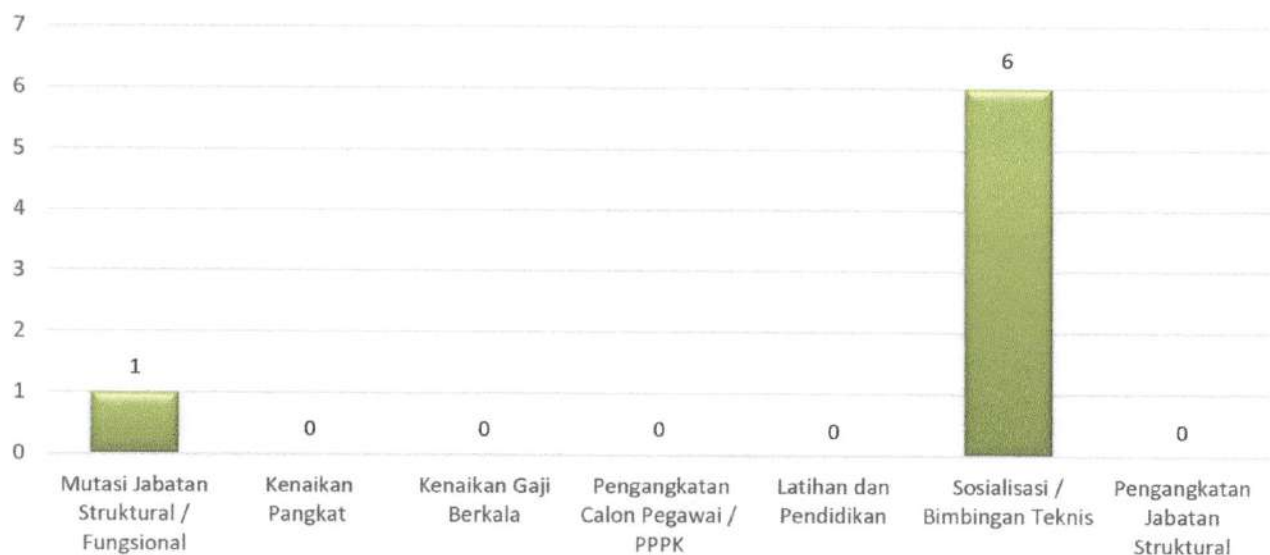
Pelantikan / Pengangkatan Jabatan Baru :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Nanik Setyorini, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	Pranata Keuangan APBN Penyelia	TMT 29 Agustus 2024

JABATAN FUNGSIONAL / STRUKTURAL



KEPEGAWAIAN



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

a. Umum

1. Tata Persuratan :

Surat Keluar

NO	SUB	SURAT			JUMLAH
		BIASA	PENTING	RAHASIA	
1	Sub.Bag.Kepegawaian dan Ortala	77	0	0	77
2	Sub.Bag.Umum dan Keuangan	12	0	0	12
3	Sub.Perencanaan, TI,dan Pelaporan	7	0	0	7
4	Kepaniteraan Muda Perkara	163	0	0	163
5	Kepaniteraan Muda hukum	35	0	0	35
6	Lain-lain	0	0	0	0
TOTAL					294

Surat Masuk

NO	SUB.BAGIAN	SURAT MASUK				JUMLAH
		DARI	BIASA	PENTING	RAHASIA	
1		MAHKAMAH AGUNG RI	14	49	1	64
2		PT.TUN-JAKARTA	3	0	0	3
3		BALITBANG DIKLAT KUMDIL	0	0	0	0
4	PERSURATAN	DIRJEND.BADIMILTUN	2	0	0	2
5		KOMISI YUDISIAL	1	0	0	1
6		PERKARA/LAIN-LAIN	9	0	0	9
7		UMUM/LAIN-LAIN	4	0	0	4
TOTAL					83	

2) Tata Kearsipan :

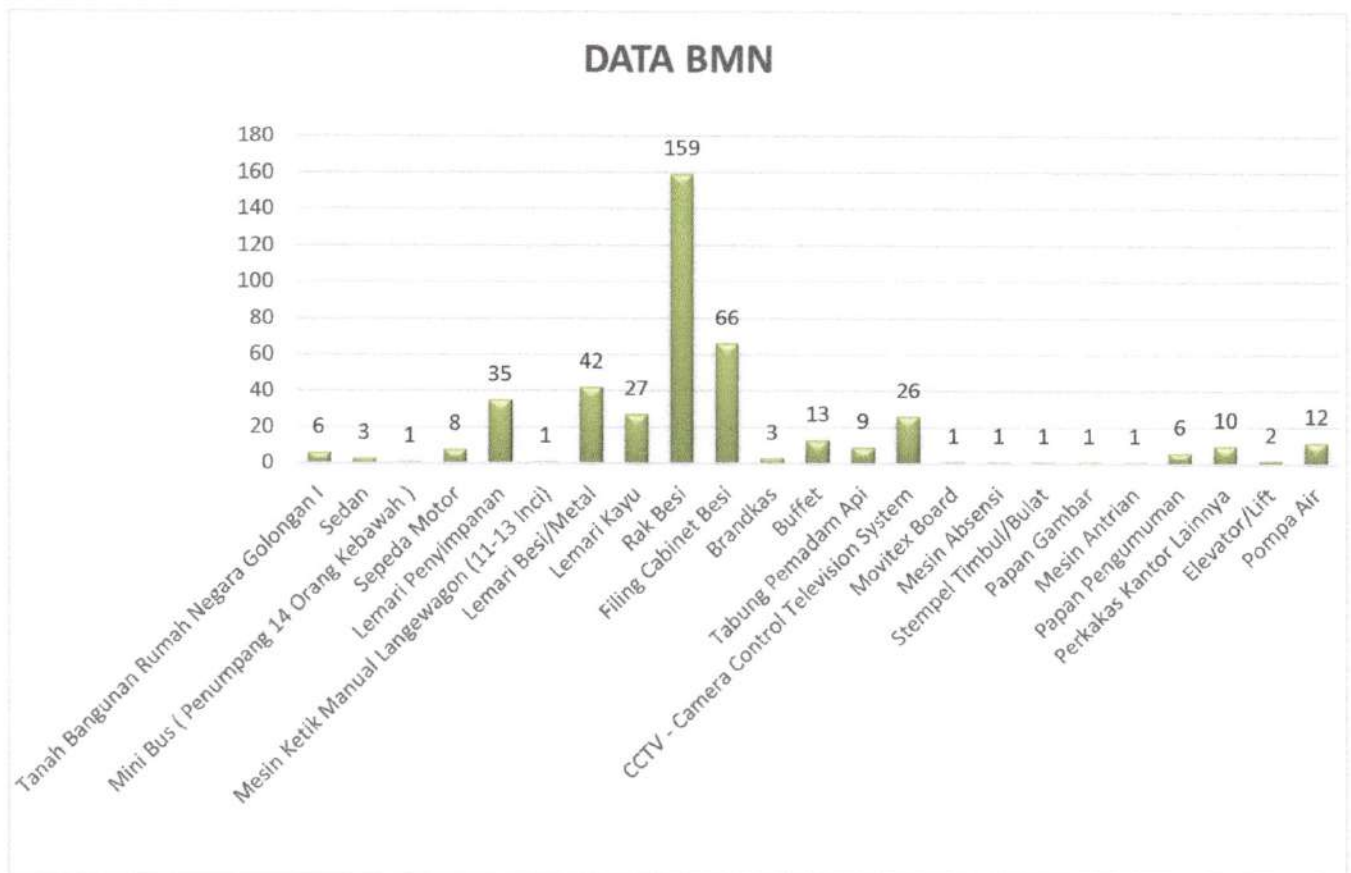
Arsip - arsip yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertata dengan tertib melalui media penyimpanan, seperti file Ordner, Rak Arsip, Lemari Besi dan Arsip Data Komputer (ADK) sehingga memudahkan dalam pencarian.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

3) Inventaris dan Persediaan :

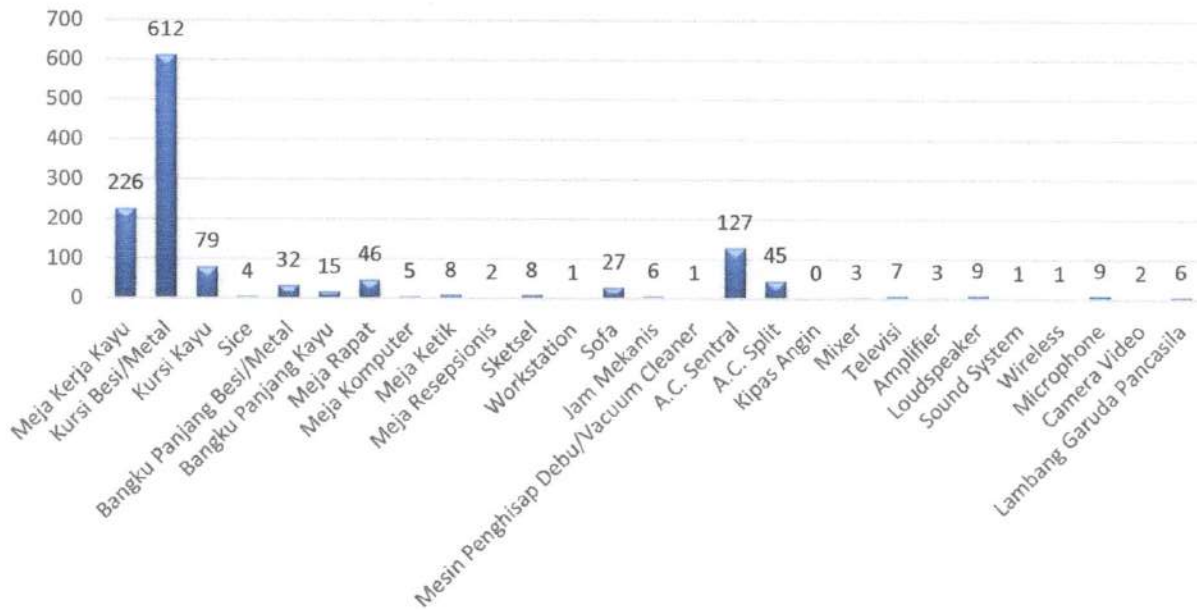
Inventaris dan persediaan kantor dikelola dan di bukukan sesuai petunjuk yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yakni menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan aplikasi Persediaan.

Untuk bulan Agustus Tahun 2024 aset Inventaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pengadaan barang / jasa sebagai berikut :

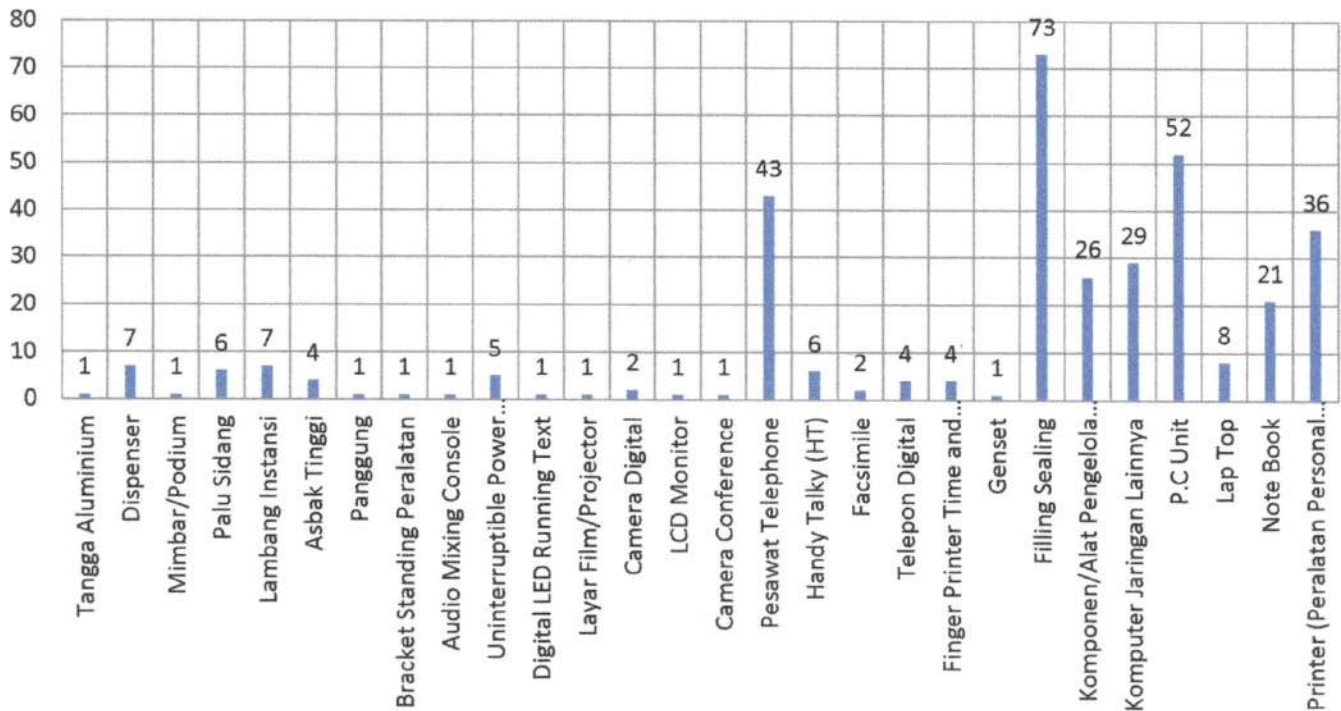


LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

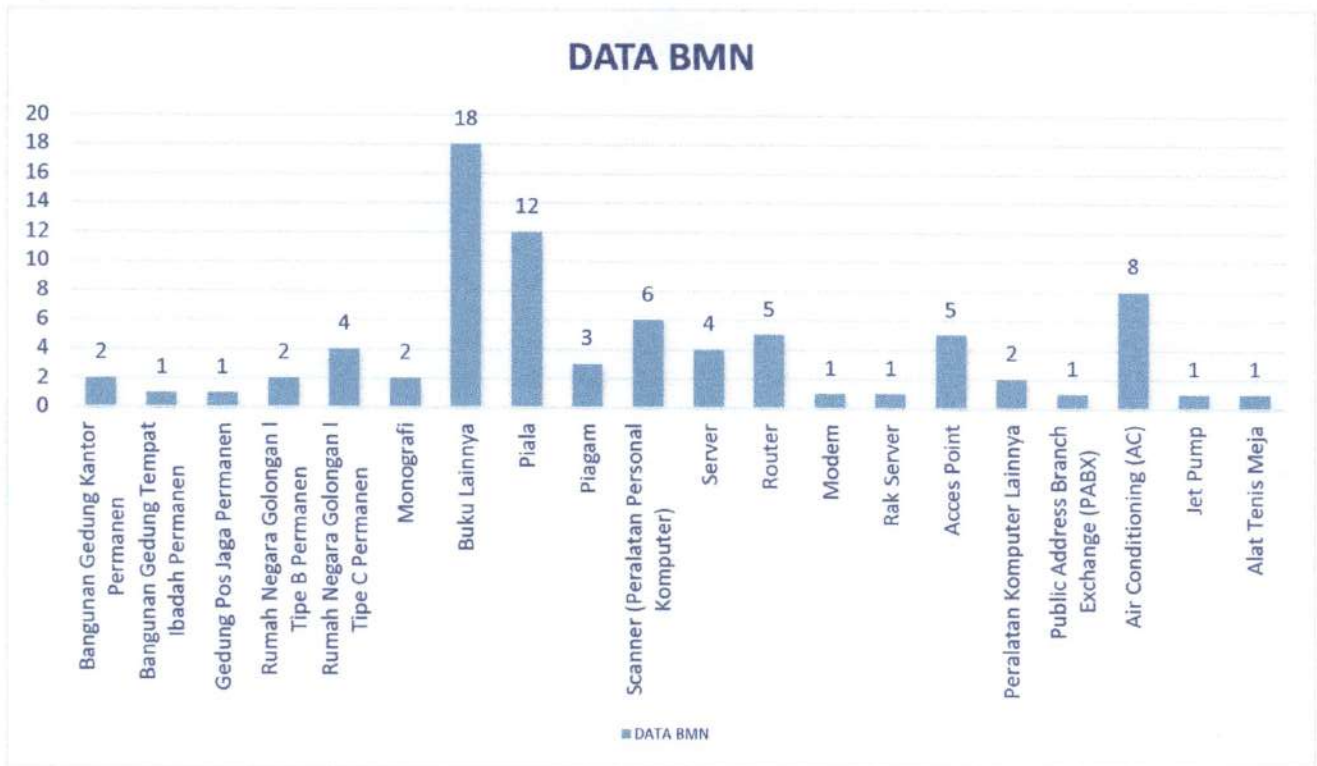
DATA BMN



DATA BMN



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



Untuk Bulan Agustus 2024 Perpustakaan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada penerimaan buku atau majalah yang masuk.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

b. Keuangan

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA BULAN : AGUSTUS 2024

SATKER / KODE SATKER : (526/732) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 PROPINSI : (01000) DKI JAKARTA
 BAGIAN ANGGARAN : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 No. DIPA : DIPA-005.01.2.526732/2024

No.	KODE	JENIS BELANJA / MAK	REALISASI S/D BULAN LALU			REALISASI BULAN INI		TOTAL REALISASI		SISA DANA		KET
			PAGU DIPA	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11 = (4-9)	12 = (11/4)	13
001	51	BELANJA PEGAWAI	13.385.206.000	9.331.538.987	70%	926.583.336	7%	10.258.122.323	77%	3.127.083.677	23%	
1066	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4.951.659.000	3.566.056.700	72%	350.404.120	7%	3.916.460.820	79%	1.035.198.180	21%	
EBA.994	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	62.000	45.708	74%	3.985	6%	49.684	80%	12.306	20%	
001.A	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	370.819.000	265.610.735	72%	25.533.485	7%	291.144.216	79%	79.674.784	21%	
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	120.377.000	85.971.392	71%	8.118.626	7%	94.090.018	78%	26.286.982	22%	
	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	43.200.000	28.800.000	67%	2.880.000	7%	31.680.000	73%	11.520.000	27%	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	5.769.150.000	4.112.110.000	71%	397.975.000	7%	4.510.085.000	78%	1.259.065.000	22%	
	511125	Belanja Tunj. PPH PNS	724.004.000	631.618.945	87%	43.928.670	6%	675.547.615	93%	48.456.385	7%	
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	257.525.000	184.815.840	72%	17.960.160	7%	202.776.000	79%	54.749.000	21%	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	1.001.611.000	373.150.000	37%	70.348.000	7%	443.498.000	44%	558.113.000	56%	
	511251	Belanja Tunjangan Umum PNS	84.654.000	46.385.000	55%	5.345.000	6%	51.730.000	61%	32.924.000	39%	
	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	39.600.000	28.164.800	71%	2.858.800	7%	31.023.600	78%	8.576.400	22%	
	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.000	672	10%	68	1%	740	11%	6.260	89%	
	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3.704.000	0	0%	0	0%	0	0%	3.704.000	100%	
	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.480.000	0	0%	0	0%	0	0%	1.480.000	100%	
	511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	4.900.000	3.900.000	71%	350.000	7%	3.850.000	79%	1.050.000	21%	
	511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	4.054.000	724.200	18%	72.420	2%	796.620	20%	3.257.380	80%	
	511628	Belanja Uang Makan PPPK	8.400.000	4.585.000	55%	805.000	10%	5.390.000	64%	3.010.000	36%	
002	52	BELANJA BARANG	2.687.430.000	1.694.766.577	63%	197.174.123	7%	1.891.940.700	70%	795.489.300	30%	
	A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran										
	521111	Belanja Keperluan Kantor	726.284.000	446.944.000	62%	55.868.000	8%	502.812.000	69%	223.472.000	31%	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	17.222.000	19.635.013	71%	1.881.900	14%	23.516.913	85%	4.205.067	15%	
EBA.994	521811	Belanja Persediaan Barang Knessumi	66.000.000	1.812.397	3%	0	0%	1.812.397	3%	64.187.603	97%	
002.A	B	Langganan Daya dan Jasa										
	521111	Belanja Keperluan Kantor	220.690.000	214.749.047	97%	417.000	0%	215.166.047	97%	5.523.953	3%	
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.800.000	906.100	19%	0	0%	906.100	19%	3.893.900	81%	
EBA.994	521125	Belanja Honor operasional Satuan Kerja	86.592.000	43.296.000	50%	7.316.000	8%	50.612.000	58%	36.080.000	42%	
	522112	Belanja Langganan Telepon	6.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	6.000.000	100%	
	522113	Belanja Langganan Air	3.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	3.000.000	100%	
	C	Pemeliharaan Kantor										
	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	189.852.000	189.777.500	100%	0	0%	189.777.500	100%	74.500	0%	
	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	45.000.000	24.353.400	54%	19.980.000	44%	44.333.400	99%	666.600	1%	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	289.680.000	188.173.100	65%	27.311.223	9%	215.484.323	74%	74.195.677	26%	
	D	Operasional Lainnya										
	521111	Belanja Keperluan Kantor	48.750.000	26.650.000	55%	0	0%	26.650.000	55%	22.100.000	45%	
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	59.200.000	0	0%	4.380.000	7%	4.380.000	7%	54.820.000	93%	
	524113	Belanja Perjalanan Dalam Kota	9.900.000	0	0%	0	0%	0	0%	9.900.000	100%	
	522141	Belanja Sewa	903.960.000	538.470.000	60%	78.120.000	9%	616.590.000	68%	287.370.000	32%	
			16.072.636.000	11.026.805.544	69%	1.123.757.459	7%	12.150.063.023	76%	3.922.572.977	24%	

Jakarta, 8 September 2024
 SEKRETARIS
 GRI WATI UTOMO, S.Kom.
 NIP. 196001161009041004

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 05

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA BULAN : AGUSTUS 2024

SATKER / KODE SATKER : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 PROPINSI : (0100) DKI JAKARTA
 BAGIAN ANGGARAN : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
 No. DIPA : DIPA-005.05.2.526733/2024

No.	KODE	JENIS BELANJA / MAK	REALISASI S/D BULAN LALU			REALISASI BULAN INI		TOTAL REALISASI		SISA DANA		KET
			PAGU DIPA	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8 = (7/4)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11 = (4-9)	12 = (11/4)	13
	52	BELANJA BARANG	71.020.000	25.505.000	36%	2.801.000	4%	28.306.000	40%	42.714.000	60%	
AEA.003.051A.5	521211	Belanja Bahan (Konsumsi Pengamanan Sidang)	34.040.000	6.560.000	19%	0	0%	6.560.000	19%	27.480.000	81%	
QCA.001.051A.5	521211	Belanja Bahan (ATK dan Penyediaan berkas perkara)	3.980.000	1.950.000	49%	0	0%	1.950.000	49%	2.030.000	51%	
QCA.001.051A.5	521211	Belanja Bahan (ATK Posbakum)	4.200.000	2.595.000	62%	401.000	10%	2.996.000	71%	1.204.000	29%	
QBA.001.051A.5	522131	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (Belanja Jasa Konsultan)	28.800.000	14.400.000	50%	2.400.000	8%	16.800.000	58%	12.000.000	42%	
			71.020.000	25.505.000	36%	2.801.000	4%	28.306.000	40%	42.714.000	60%	

Jakarta, September 2024

SEKRETARIS

GIRI WAHYU JITO, S.Kom.
NIP. 19840326 200904 1 004

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

a. Teknologi Informasi, pengelolaan website dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yaitu dengan melakukan pembaruan konten berita website yaitu dengan adanya Rapat Bulanan untuk Bulan Agustus 2024 agenda rapat meliputi :

- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan dan mengingatkan kepada Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan seluruh Pegawai agar dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara Professional dengan tetap berpegang teguh dan berpedoman pada KEPPH, Kode Etik Kepaniteraan, Kode Etik ASN dan Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016 dan Maklumat No. 1 Tahun 2017 supaya kita dapat terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan terkait Disiplin Pegawai agar berpedoman pada PP 94/2021, PP 11/2017, PERKA BKN 21/2010, 071/KMA/SK/V/2008;
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan kepada seluruh peserta rapat bahwa ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ketua agar dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menginstruksikan kepada Hakim Pengawas Bidang agar melaporkan hasil temuan dan apakah sudah ditindak lanjuti temuan-temuannya oleh Bagian-Bagian yang diperiksa;
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga menginstruksikan kepada Sekretaris terkait PNBPN dikarenakan PTUN Jakarta tidak memiliki Bendahara PNBPN agar diusulkan 4 orang Pegawai;
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menyampaikan terkait SMAP akan dilakukan evaluasi tanggal 20 September 2024, agar Sekretaris tetap melakukan pembinaan kepada Security dan juga kepada Petugas Sidang;
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan kepada seluruh Peserta Rapat agar Nilai PKP harus sesuai dengan Kinerja yang sebenarnya:

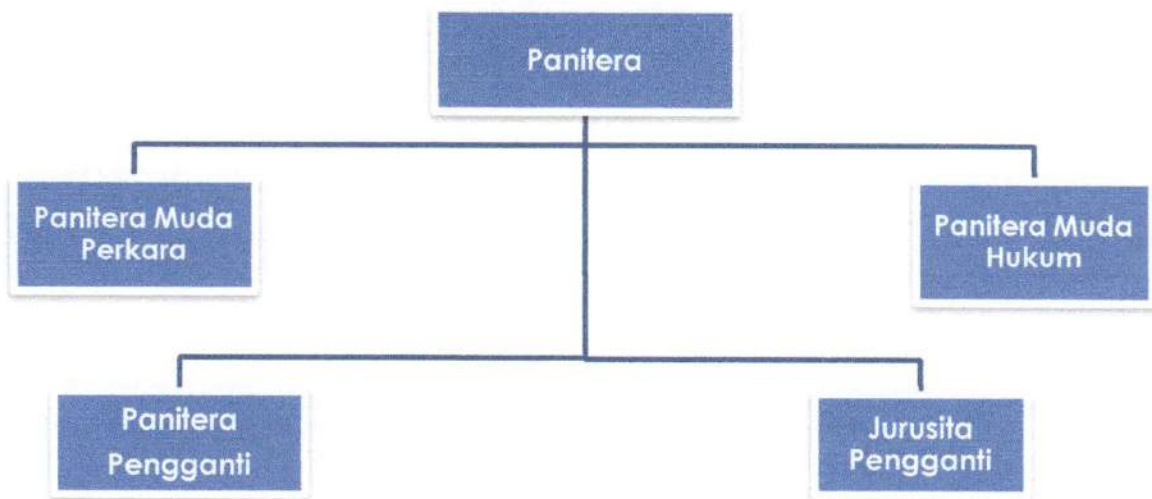
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan perihal tentang Berkas Upaya Hukum di Kasasi dan PK yang kurang lengkap agar dibentuk segera Tim Quality Control dan checklistnya diperiksa langsung oleh Panitera Muda Perkara;
 - Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan tentang Evaluasi SMAP agar Tim Document Control memberi label ke semua berkas yang sudah ada.
- b. Pelaporan, jenis laporan yang di kerjakan pada sub bagian ini merupakan laporan yg bersifat umum pada Satuan Kerja dan laporan yang bersifat khusus terkait Kesekretariatan.

B. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Struktur Organisasi Kepaniteraan



1. Kepaniteraan Muda Perkara

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara :

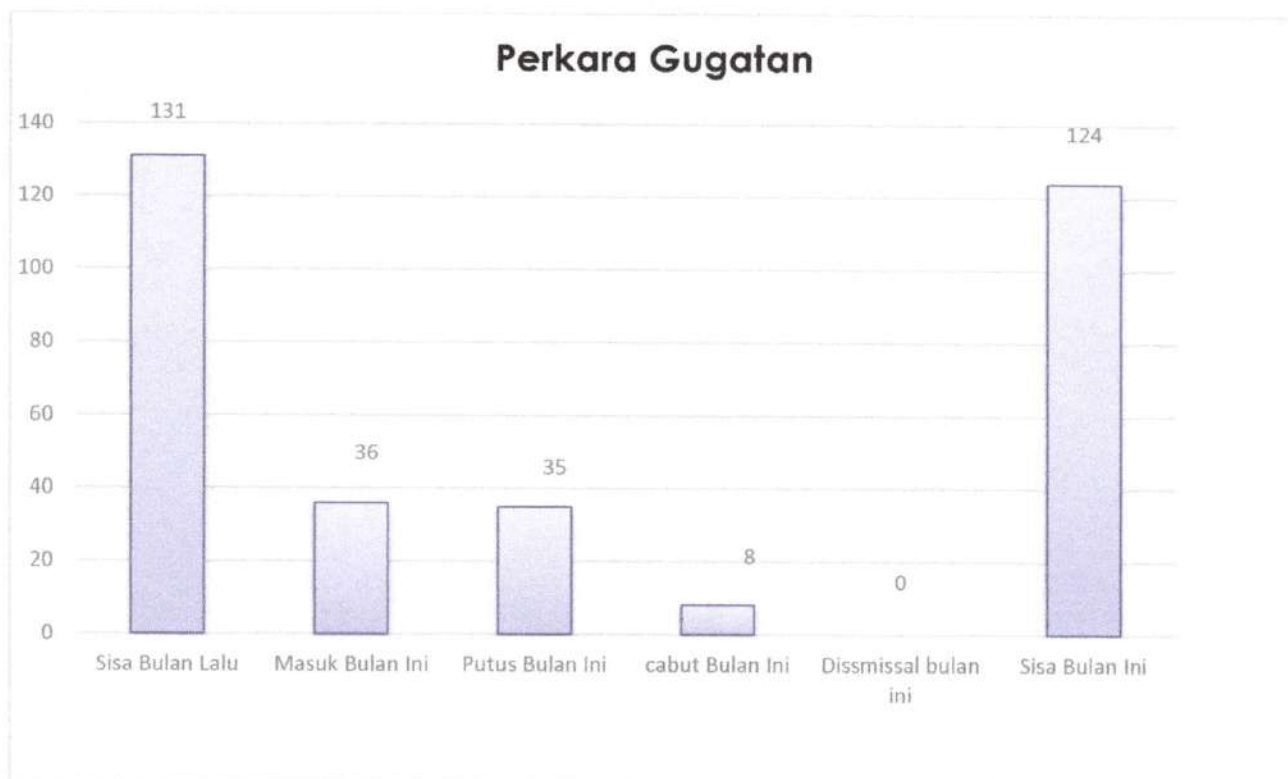
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara TUN.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- Menerima Gugatan Permohonan Banding, Kasasi, PK, Plw dan Eksekusi.
- Meneliti berkas perkara masuk.
- Mencatat setiap perkara yang diterima dalam register.
- Memberi nomor register pada surat gugatan.
- Mencatat gugatan yang diterima lewat pos.
- Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang
- Membuat SKUM setelah bayar lunas panjer perkara di bank.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Membuat jurnal keuangan perkara.
- Membuat Laporan bulanan keuangan perkara.
- Membuat laporan bulanan keadaan perkara.
- Membuat/memberitahukan akta/pernyataan, memori, kontra dalam perkara Banding, kasasi dan PK kepada para pihak.
- Memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas yang akan dikirim (Inzage)
- Mengirim berkas perkara Banding, kasasi dan PK (Bundel A dan B).
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti, membuat berita acara dan putusan.
- Mencatat jalannya sidang yang ditetapkan oleh majelis.
- Memberitahukan isi putusan kepada para pihak.
- Menyerahkan arsip berkas perkara incraht kepada panmud Hukum.
- Melakukan bimbingan kepada staf pandmud perkara.
- Mengusulkan mutasi dalam rangka penyegaran dan karier pegawai staf pandmud perkara.
- Mengevaluasi hasil pekerjaan tahun 2023.
- Membuat SKP. 2 pegawai staf pandmud perkara
- Menyusun rencana kerja panmud perkara tahun 2024

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Keadaan Perkara

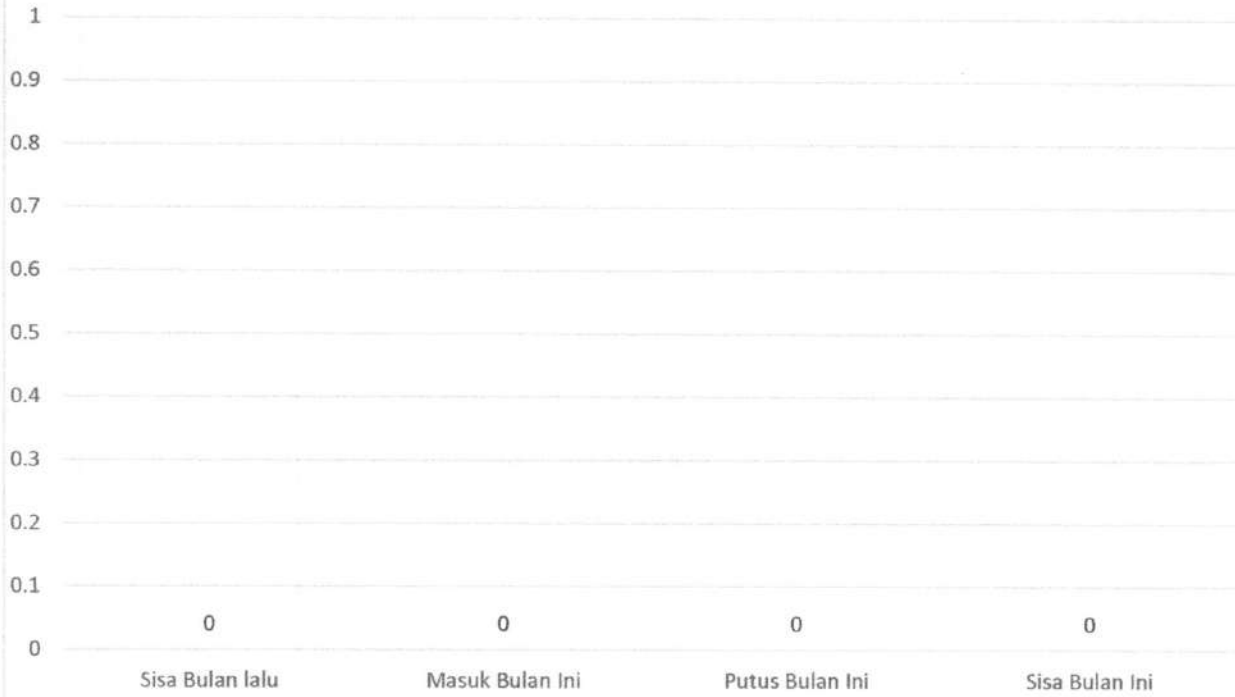


Catatan : Total Putus bulan ini adalah (di cabut + dismissal + Putus bulan ini)

$$8 + 0 + 35 = 43 \text{ Perkara}$$

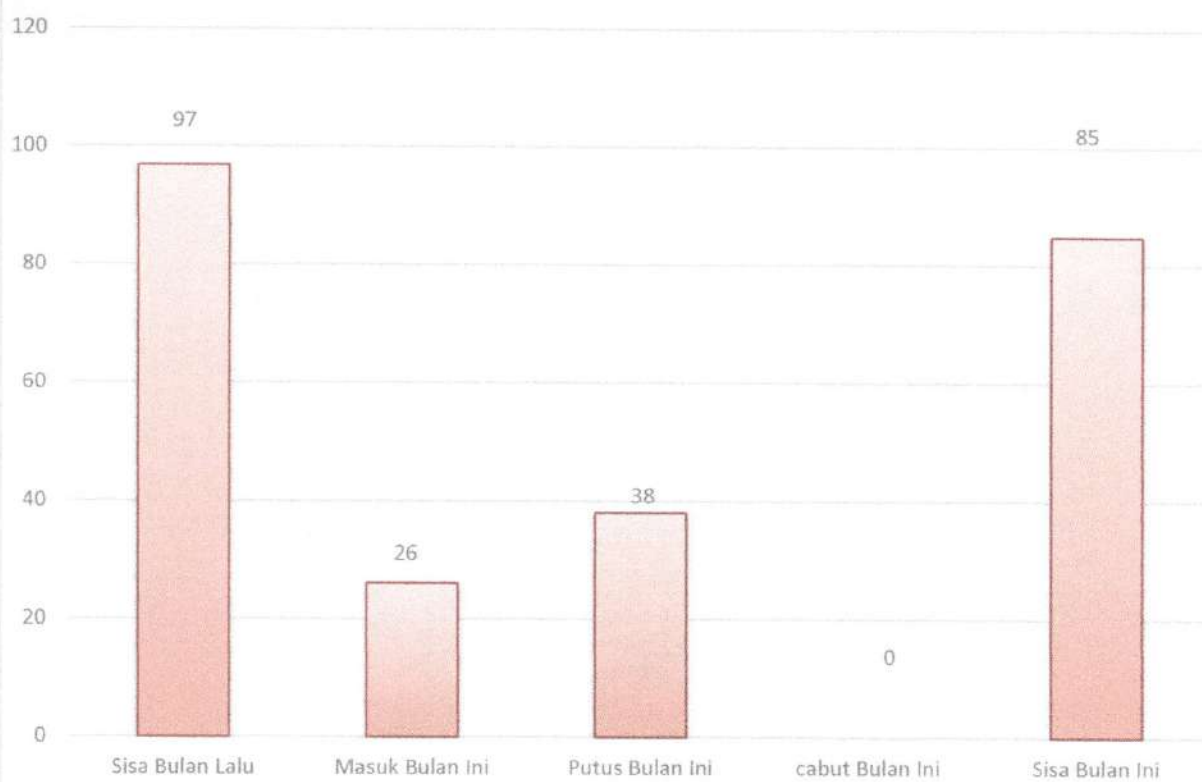
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Perlawanan



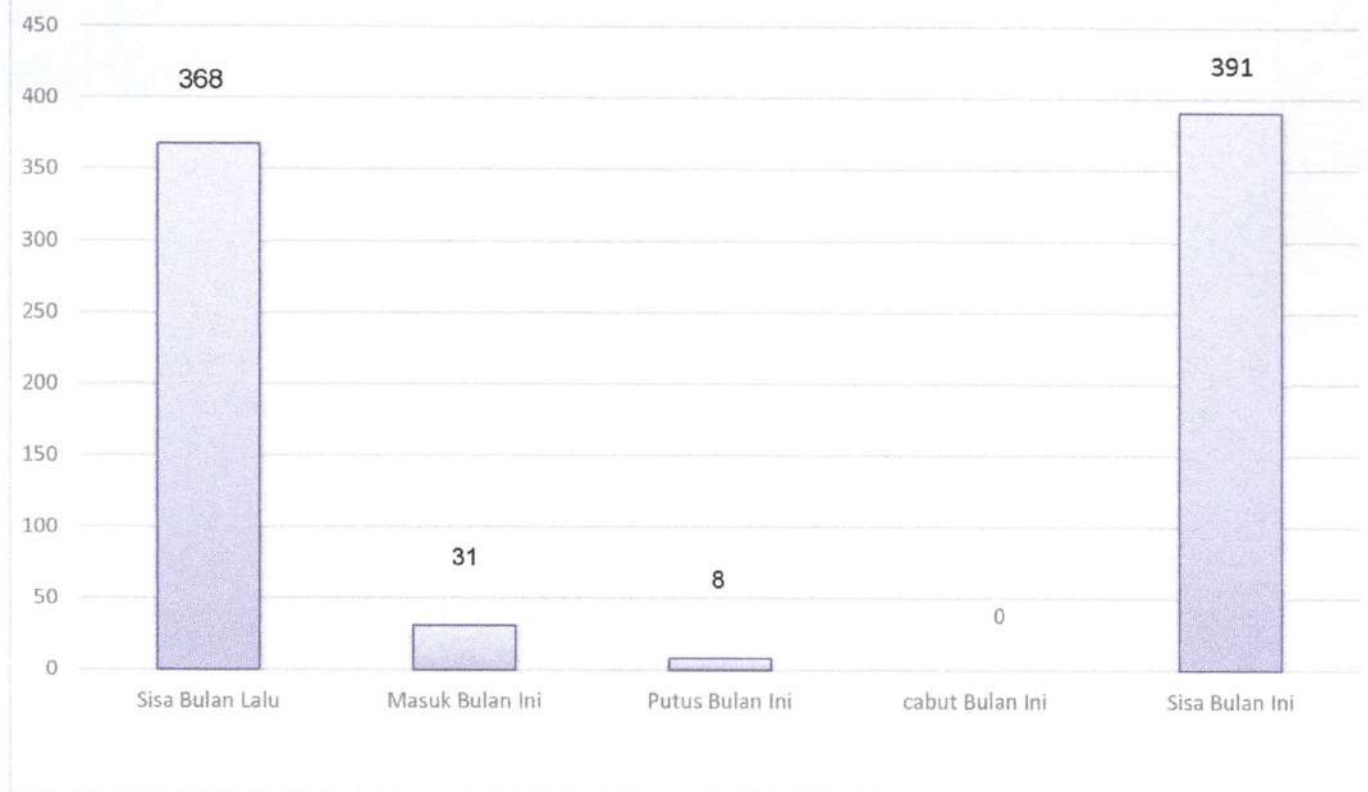
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Banding



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Kasasi



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

2. Kepaniteraan Muda Hukum

- Laporan Jenis Perkara Bulan Agustus 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN JENIS PERKARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

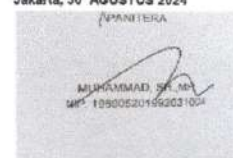
FORMULIR LI-T2

NO	Jenis Perkara	Sisa Bulan Lalu	Perkara		Pengugat		Terdugat		Perlawanan	Putusan	Permohonan	Tenaga Berkas		Keterangan													
			Masuk	Dikeluar	Jumlah	Peranginan	Badan Hukum	Pusat				Daerah	Dismissal		Dikabul	Tidak Dikabul	Banding	Kasasi	Keputusan Kembali								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A GUGATAN																											
1	Perlawanan	14	4	2	18	1	3	1	3	-	-	-	-	-	3	-	3	13	3	8	2	-	7	-	2	-	-
2	Kepegawaian	8	2	-	10	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	8	-	-	-	-	-	2	-	-
3	Perjinan	22	5	-	27	1	4	6	-	-	-	-	-	-	1	2	3	24	4	3	3	1	4	1	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Hukum/ Parpol	8	3	1	10	3	-	3	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	3	-	-	-	1	-	1	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pengantian Antar Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	10	1	-	11	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	5	6	-	-	-	-	-	1	1	-
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	24	10	-	34	4	6	9	1	-	-	-	2	-	3	3	8	26	8	12	1	-	19	-	2	-	-
17	Merek	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Lain Lain	44	11	-	55	4	7	9	2	-	-	-	2	1	8	5	16	39	10	8	-	1	7	4	-	-	-
JUMLAH		131	36	3	164	15	21	29	7	-	-	-	5	4	17	14	40	124	28	31	6	2	38	8	6	-	

MENGETAHUI



Jakarta, 30 AGUSTUS 2024



- Laporan Penanganan Pengaduan Bulan Agustus 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN BULANAN PENANGANAN PENGADUAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

L1-T5

NO	NAMA PENGADU	HAL YANG DIADUKAN	TANGGAL PENGADUAN	TINDAK LANJUT PENGADUAN	KETERANGAN
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jakarta 30 AGUSTUS 2024



C. KEGIATAN LAIN – LAIN

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melaksanakan Upacara Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024. Menindaklanjuti arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024 dan memperhatikan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-16/M/S/TU.00.03/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dengan tema "Nusantara Baru Indonesia Maju". Upacara dilaksanakan tepat pukul 07.00 WIB di Halaman depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Bertindak sebagai Pembina Upacara yaitu Ibu.Oenoen Pratiwi, S.H., M.H. Upacara diikuti oleh seluruh Hakim, Pejabat struktural/Fungsional Kepaniteraan dan Kesekretariatan, seluruh ASN, Cakim, PPPK dan PPNPN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Pada Hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadakan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertempat di halaman kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan tema **Peradilan Tangguh Indonesia Maju**. Upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Mahkamah Agung dihadiri Oleh Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural Dan Fungsional, Cakim Serta Seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

BAB III

TELAAHAN

Kondisi Rumah Dinas

Bahwa Rumah Negara/Dinas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang saat ini berjumlah 6 unit, dengan kondisi 2 unit dalam keadaan rusak ringan dan 4 unit kondisinya dalam keadaan tidak layak huni/memprihatinkan seperti banyaknya atap rumah yang bocor, kusen yang lapuk, lantai keramik yang retak, tembok yang rusak. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerlukan anggaran untuk renovasi rumah dinas.

Kondisi Kendaraan Dinas

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 12 Kendaraan Dinas

1. Kendaraan Roda 4 berjumlah 4 Unit, dalam kondisi rusak ringan oleh karena itu PTUN Jakarta membutuhkan tambahan anggaran.
2. Kendaraan Roda 2 berjumlah 7 Unit, dalam kondisi rusak berat sebanyak 2 (dua) unit dan 5 (lima) unit dalam keadaan rusak ringan. Oleh karena itu PTUN Jakarta memerlukan tambahan anggaran perawatan dan terhadap 2 unit kendaraan rusak tersebut kami akan mengusulkan penghapusan dari barang milik negara sehingga PTUN Jakarta masih membutuhkan 2 unit kendaraan roda 2 (dua).
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta saat ini mempunyai pegawai secara keseluruhan berjumlah 86 ASN, 2 Orang CPNS, 11 PPNPN, dan 1 orang PPPK sebagian pegawai tersebut terdapat adanya jabatan rangkap, khususnya ada 3 (tiga) Panitera Pengganti dan 5 (lima) JSP yang merangkap sebagai staf pada Kepaniteraan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih memerlukan penambahan pegawai yang diperuntukan sebagai staf di Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

BAB IV

KESIMPULAN, USUL DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Pelaksanaan jalannya organisasi dan tata kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Bulan Agustus 2024 berjalan dengan baik dan lancar.

2. USUL DAN SARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kami mengusulkan peningkatan Sumber Daya Manusia :

- Mohon agar diberikan Anggaran untuk renovasi rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Mohon Penambahan Pegawai untuk ditempatkan di bidang Kesekretariatan dan di Kepaniteraan yang saat ini banyak di isi dari Pejabat Fungsional (Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti).
- Mohon agar diberikan Anggaran Belanja Modal untuk keperluan Pengadaan Scanner untuk Panitera Pengganti dan Kepaniteraan.


Jakarta, 09 September 2024



Mengetahui
Ketua,





Genoen Pratiwi, SH, MH
NIP. 197210261992032001

Sekretaris,









Giri Wahyu Utomo, S.Kom
NIP. 198403262009041004

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta







No	Rumah Dinas 1 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
1		<ul style="list-style-type: none">- Rumah dinas Ketua PTUN Jakarta,- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, serta langit-langit akan runtuh.• Membahayakan / beresiko difungsikan,• Perbaikan dengan rekonstruksi.
		
		
		




Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 2 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
2		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi Rusak Ringan yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Atap atap /plafon jebol, • Kusen yang sudah termakan rayap, • Dinding / tembok yang sudah mulai kusam dan rusak • Kaca depan rumah pecah • Pagar roboh
		
		
		
		
		





Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 3 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
3		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi rusak berat yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, • Komponen penunjang lainnya rusak total • Membahayakan / beresiko difungsikan, • Perbaikan dengan rekonstruksi.
		
		
		
		
		

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 4 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
4		<ul style="list-style-type: none">- Rumah dinas Wakil Ketua PTUN Jakarta,- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak,• Kompenen penunjang lainnya rusak seperti atap dan pagar• Membahayakan / beresiko difungsikan,• Perbaikan dengan rekontrusi.

KENDARAAN DINAS RODA 2

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
1	Honda Tiger CW 200 cc	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Tiger CW 200 cc - Plat Nomor B 6017 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Berat 	2	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6016 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
3	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6018 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan 	4	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6391 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan
					

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
5	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6392 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	6	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6393 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Berat
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
7	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6394 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	8	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6395 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan
					